

**KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Adi Tyas Tamtomo
NIM. E0013013**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:

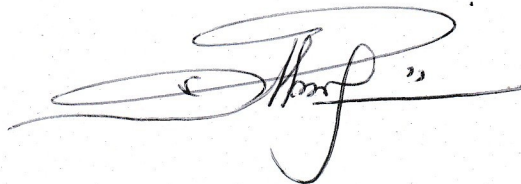
ADI TYAS TAMTOMO

NIM. E0013013

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 12 Oktober 2017

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subekti', with a stylized flourish extending to the right.

Subekti, S.H., M.H.

NIP. 19641022 198903 2 002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Disusun oleh :

Adi Tyas Tamtomo

NIM. E0013013

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 02 November 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Ismunarno, S.H., M.Hum.

NIP : 19660428 1990031001

Ketua

(.....)

2. Nama : Sabar Slamet, S.H., M.H.

NIP : 19560727 1986011001

Sekretaris

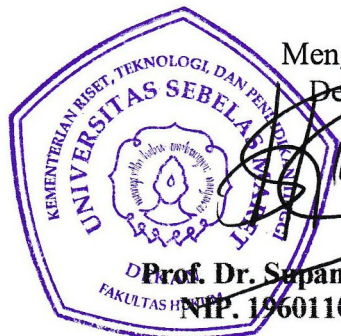
(.....)

3. Nama : Subekti, S.H., M.H.

NIP : 19641022 1989032002

Anggota

(.....)



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Sepanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

NAMA : Adi Tyas Tamtomo

NIM : E0013013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Adi Tyas Tamtomo

NIM. E0013013

ABSTRAK

Adi Tyas Tamtomo. 2017. E0013013. KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Korban tindak pidana pelanggaran HAM berat banyak yang menderita kerugian yang begitu besar baik materiil maupun immateriil maka sudah seharusnya negara bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kompensasi pada korban. Kompensasi dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan pemberian kompensasi. Kelemahan tersebut menjadikan kompensasi sulit untuk dieksekusi sehingga selama ini korban pelanggaran HAM berat tidak pernah mendapatkan kompensasi.

Kata kunci: Kompensasi, Korban Pelanggaran HAM berat

ABSTRACT

Adi Tyas Tamtomo. 2017. E0013013. COMPENSATION AS THE FORM OF LEGAL PROTECTION TO THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATION BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

The aims of this legal research are to find out the regulation of compensation for victims of gross human rights violations based on positive law in Indonesia and the implementation of compensation for gross human rights violations that have occurred in Indonesia. This research is a prescriptive normative law by using statue approach and case approach. The legal sources used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The technique collecting of the legal materials in this research is literature study. Analysis techniques of legal materials used in this reseacrh is deduction with syllogistic method.

Victims of criminal acts of gross human rights violations who suffer losses so both material and immaterial that the state should be responsible to provide legal protection by providing compensation to victims. Compensation in positive law is regulated in Indonesian Constitution Number 26 year 2000 regarding Human Rights Court, Indonesian Constitution Number 13 Year 2006 juncto Indonesian Constitution Number 31 Year 2014 on Protection of Witness and Victim, Government Regulation Number 3 of 2002 on Compensation, Restitution and Rehabilitation Against Victims of Serious Human Rights Violations, and Government Regulation Number 44 Year 2008 on the Granting of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. In fact still there are some weaknesses in the regulation of compensation. The weaknesses makes compensation difficult to be executed so that the victims of gross human rights violations never get compensation.

Keywords: Compensation, Victims of gross human rights violation

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah

(Lessing)

*Terus berusaha dan berkarya yang terbaik karena Tuhan mempunyai rencana
indah pada waktunya*

(Penulis)

Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian dan saya menang

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulisan hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Almamater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Keluarga penulis yang selama ini terus memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta maka dengan ini puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan kurnia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”** dengan lancar.

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan sebuah hasil dari penelitian secara pustaka tentang pengaturan dan pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh organ negara dan menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban. Maka dari itu negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi pada korban melalui kompensasi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga Penulis dengan besar hati menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan Penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini dapat terwujud berkat adanya pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan berbagai pengetahuan. Sehingga Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Jurnal Hukum, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan Jurnal Hukum ini;

4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;
6. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi penuh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
7. Rhesita Bunga sebagai kekasih yang telah membantu, memberi semangat, dan pacuan selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
8. Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” sebagai salah satu keluarga kecil yang ada di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penulisan hukum ini;
9. Teman-teman dari skripsi hukum pidana, Tria, Bella, Poldung, Nurhanifah, Caca, Wini, Trihadi, yang selalu mendukung dan menjadi teman bertukar pikiran dalam penulisan hukum ini;
10. Lely, Tegar, Jengki, Andre, Pratama, Nanda, Detika, Embun, Kiki, Julio, dll sebagai teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Teman-teman KKN Sugihrejo 2016 yang memberikan pengalaman dan pacuan kepada penulis;
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Surakarta, 12 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Kemanusiaan.....	13
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	20
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	34
B. Kerangka Pikiran.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	41
1. Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.....	45
2. Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	49
B. Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.....	57
1. Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Timor-Timur.....	63
2. Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Tanjung Priok.....	69
3. Pengadilan HAM Abepura.....	77
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

DAFTAR BAGAN

BAGAN

Bagan I Kerangka Pemikiran.....	38
Bagan II Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran HAM.....	54

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1 Kasus Pelanggaran HAM di Pengadilan.....	3
Tabel 2 Perjanjian HAM Internasional tentang kewajiban ganti rugi.....	40
Tabel 3 Perbedaan Pengertian UU Pengadilan HAM dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban.....	43
Tabel 4 Perbandingan Pengaturan Kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.....	45
Tabel 5 Putusan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Timor-Timur.....	66
Tabel 6 Perbedaan Kesimpulan Kejaksaan Agung dan KPP HAM tentang Kasus Pelanggaran HAM di Timor-Timur.....	68
Tabel 7 Putusan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Tanjung Priok.....	71
Tabel 8 Kompensasi yang diajukan ke Kejaksaan Agung.....	75
Tabel 9 Korban yang Mendapatkan Kompensasi.....	76
Tabel 10 Putusan Pengadilan HAM Abepura.....	80

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Gambar 1 Rumus Penghitungan Ganti Kerugian.....	64
---	----